

**ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA KEBIRI DALAM
KAJIAN SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S 1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:
Zulkipli
NIM. 4011311117
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkipli

NIM : 4011311117

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA
KEBIRI DALAM KAJIAN SISTEM
PEMIDANAAN INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM PIDANA KEBIRI DALAM KAJIAN
SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA**

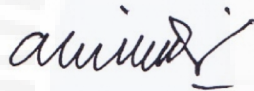
Oleh :

Zulkipli

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



(A.Fauzi Amiruddin, S.H., M.H.)

NP. 10.52.06.003

Pembimbing Pendamping



(Dr.Dwi Haryadi, S.H., M.H.)

NIP. 198307172012121004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)

NP.608410029

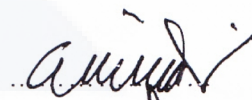
HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA KEBIRI DALAM KAJIAN SISTEM
PEMIDANAAN INDONEESIA

SKRIPSI

Oleh:
Zulkipli
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 12 juli 2017
Dan dinyatakan lulus
Majelis Penguji

1. Ketua : A Fauzi Amiruddin, SH., MM.
NP. 105206003



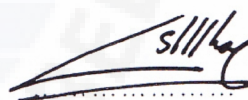
2. Sekretaris : Toni, SH.,MH.
NP. 608010028



3 Anggota : Reko Dwi Salfutra, SH.,MH.
NIP. 198504122014041002



4 Anggota : Sigit Nugroho, SH.,MH
NP. 198402101012121005



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi., S.H., M.H)
NP. 60 60 07 014

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang selalu dekat dalam hidupku

- 1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik*
- 2. Kepada Ayahanda, Missudaryo yang selalu berusaha dalam bekerja sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik*
- 3. Kepada Ibunda tercinta, Anyo yang selalu menasehati dan mendoakan saya dalam menjalankan perkuliahan dari awal sampai akhir*
- 4. Kepada Adik saya, Pahrol dan Ratih yang telah memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi dengan baik*
- 5. Kepada calon istriku, Siti Khoiriah Amd, Keb. Yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik*

Hidup adalah perjuangan tanpa perjuangan tidak akan terasa namanya kehidupan yang lebih baik

ABSTRAK

ZULKIPLI

4011311117

ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA KEBIRI DALAM KAJIAN SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

Skripsi. Fakultas Hukum 2017

Kata kunci: Pemidanaan, Sanksi kebiri, sistem Pemidanaan

Pemidanaan merupakan hal yang penting dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan khususnya kejahatan kekerasan dan kesusilaan kepada anak dan perempuan. Sistem pemidanaan merupakan sistem perundang undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan dan dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi pidana dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil pada tahap formulasi. Pemidanaan dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam KUHP. Pemidanaan di dalam KUHP di jelaskan pada Pasal 10 huruf b yang meliputi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Tetapi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut khususnya penjatuhan pidana penjara tidak memiliki efek jera terhadap pelaku, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang sanksi pidana kebiri, sehingga dalam penjatuhan sanksi kebiri tidak berdasarkan Pasal 10 huruf b KUHP. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui kedudukan sanksi kebiri di dalam sistem pemidanaan Indonesia dan bagaimana implementasi sanksi kebiri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang undangan, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder dengan spesifik. Kedudukan sanksi kebiri didalam sistem pemidanaan adalah sanksi kebiri masih diberikan kepada hakim dan merupakan kewenangan hakim untuk menggunakan aturan tambahan di dalam vonis sebuah kasus kejahatan seksual sesuai dengan tingkat kejahatan pelaku. Implementasi sanksi kebiri di Indonesia belum dapat dilaksanakan dikarenakan Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum ada. Dalam penerapan sanksi kebiri hal tersebut pemerintah dan penegak hukum harus memiliki ide dan konsep sehingga penerapan sanksi tersebut akan berjalan sebagai mestinya dan dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang terealisasinya penerapan sanksi kebiri yang berdasarkan peraturan perundang undangan. Jika sanksi telah diterapkan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan maka pemerintah harus melakukan pengawasan baik dari kesehatan maupun psikologi terhadap pelaku, maka pemerintah berupaya dalam tindakan melakukan rehabilitas terhadap pelaku tersebut

ABSTRACT
ZULKIPLI
LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACT IN STUDY OF INDONESIA
CRIMINAL SYSTEM

Keywords: *Punishment, Emasculated, Criminal System*

Punishment is an important thing in sanction especially violence and morally to the children and woman. The criminal system is a laws system that arrange how the criminal law is enforced and operated concretely so that everyone who has been imposed of criminal act in criminal law material and formal at a step of formulation. The punishment can be imposed by judge based on elements of criminal act that contained in criminal code (Penal Code In Indonesia). The punishment in criminal code can be explained at article 10 letter b which consists of principal punishment and additional penalties. But imposeed of criminal act especially to perpetrators which has no deterren effect, so the government issued the government regulation in lieu of legal 1 of 2016 on emasculated sanction not based on article 10 pragraf b criminal code. The aims of this research are to know the position of emasculated in Indonesia and how the implementation of emasculated in Indonesia. The research methods which are used are normative juridical and empiric juridical approach and law approach by primary data emasculated which is still given by jugde and the judge,s authority to use additional rules in sexual crimes based on the level of criminal offender. The implementation of emasculated in Indonesia cannot be done because there is no goverment regulation. The government and law enforcer must have idea and concept in implementing emasculated so that the application of that sanction will run as it should be and need infrastructure to support the realization of emasculated according to legislations. If the sanction has been applied to the perpetrations of crime so the government must have a good control from health of psychology to the perpetrators, thus the government try to rehabilitation them.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Sanksi Pidana Kebiri Dalam Kajian Sistem Pemidanaan Indonesia”** Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program strata satu (S1) Program ilmu hukum di Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang ada pada skripsi. Oleh karena itu Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama di tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf M., SI Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Bapak Toni S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan keuangan Fakultas Hukum.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, terima kasih atas waktu, masukan selama menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Fauzi Amiruddin, S.H., M.H Selaku Pembimbing Utama yang telah membantu sepenuh hati dalam memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

6. Bapak Dr Dwi Haryadi S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping terima kasih atas waktunya memberi motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Terima Kasih telah mendidik penulis selama ini di bangku kuliah
8. Bapak dan Ibu BAK, AUK, dan petugas perpustakaan di Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah membantu dalam pelayanan yang diberikan selama di bangku kuliah.
9. Bapak Yudi Istono Selaku KASI KAMNEG dan TIBUM ASISTEN TP. PIDUM di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, terima kasih untuk bantuan dan kerjasamanya dalam memberi data fakta penelitian guna memperlancar penyelesaian Skripsi saya
10. Bapak Wahyu Kurniawan Selaku pakar Psikolog yang telah meluangkan waktu untuk membantu memberikan data penelitian guna memperlancar penyelesaian Skripsi saya
11. Ibu Diana Rahmawati Selaku Pengacara yang telah memberikan waktu untuk memberikan data fakta penelitian guna kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
12. Untuk keluarga Besarku, terima kasih atas bantuannya, dukungan, semangat dan doa yang diberikan kepada penulis.
13. Untuk Almamater ku dan teman teman Fakultas Hukum angkatan 2013 Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa disebut namanya satu per satu

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSRTAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Landasan Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG SANKSI KEBIRI DALAM KAJIAN SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA	
A. Dasar Pidana dan Pidanaan	
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	20
2. Jenis-Jenis Pidanaan.....	28
3. Sifat-Sifat Pidanaan.....	30
4. Pidanaan perspektif Pancasila.....	34
5. Teori Pidanaan.....	36
B. Sistem Pidanaan di Indonesia.....	42

C. Hukuman Kebiri.....	48
D. Kajian dan Penerapan Hukuman Kebiri di Berbagai Negara.....	54
1. Polandia.....	55
2. Norwegia.....	55
3. Australia.....	55

**BAB III ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA KEBIRI DALAM KAJIAN
SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA**

A. Kedudukan Sanksi Kebiri Dalam Sistem Pidana Indonesia.....	58
B. Emplementasi Sanksi Kebiri di Indonesia.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

